

UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Aris Budiyo
Jurusan Teknik Mesin
FT Universitas Negeri Semarang
Email: aries_budiy@yahoo.com

Abstrak

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertugas menyiapkan peserta didik memasuki lapangan pekerjaan dan telah melakukan terobosan antara lain bahwa pendidikan di SMK dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kompetensi serta pada akhir pendidikan peserta didik yang memenuhi persyaratan akan memperoleh ijazah dan sertifikat kompetensi keahlian. Pembahasan meliputi: (1) penilaian berbasis kompetensi (Competency-based Assessment /CBA) sebagai konsekuensi diimplementasikannya Competency-based Learning di SMK dan (2) model uji kompetensi keahlian di SMK. Uji kompetensi keahlian siswa SMK sebagai penilaian hasil belajar dalam sistem pembelajaran kompetensi pada dasarnya merupakan proses penentuan untuk memastikan peserta didik apakah sudah kompeten atau belum kompeten. Terdapat tiga model uji kompetensi keahlian siswa SMK dan model project work adalah model yang paling banyak diterapkan oleh SMK sebagai model uji kompetensi keahlian siswa.

Kata kunci: sekolah menengah kejuruan, uji kompetensi keahlian

Abstract

Vocational Secondary Education is responsible for preparing students to enter the work force. The education has taken an innovative step that the education is conducted with competence-based approach. At the end of the education, the students who satisfy the requirements will be awarded a diploma and competence certificate. The paper discusses: 1) Competence-Based Assessment (CBA) as a consequence of the implementation of Competence-Based Learning in vocational schools, 2) model of competence test in vocational schools. Competence test for vocational school students as an assessment in competence learning system is basically a process to determine whether a student has been competent or not. There are three model of competence test for vocational school students. The project work is the model that is most widely applied by vocational schools as competence assessment model.

Keywords: vocational school, competence assessment

PENDAHULUAN

Terobosan yang telah dilakukan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja Indonesia memasuki percaturan dunia tenaga kerja di wilayah regional, baik dalam konteks *Chine-Asean Free Trade Agreement* (C-AFTA) maupun *Asean Free Labour Agreement* (AFLA) adalah dirumuskannya kebijakan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Pengembangan SDM tersebut diwujudkan dalam kerangka kerja nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hakekat kebijakan pengembangan SDM dalam kerangka BNSP adalah disepakatinya sistem standarisasi kompetensi nasional yang akan menjadi rujukan bagi lembaga diklat dan lembaga pengujian serta instansi lain yang terikat dalam pengembangan SDM. BNSP adalah lembaga non struktural yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lembaga ini berdiri berdasar pada PP No. 23 tahun 2004 Lembaran Negara No. 78 tahun 2004.

Salah satu pokok pikiran yang tertuang dalam pengembangan pendidikan kejuruan menjelang 2020 (Depdikbud, 1997: 9) adalah sistem pendidikan kejuruan yang dipacu oleh dunia usaha/ industri. Konsekuensi tuntutan tersebut adalah bahwa sistem diklat pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus mampu menyiapkan lulusannya yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar industri baik secara nasional maupun internasional (PP 23/2004). Dengan demikian, standar kompetensi akan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum dan program diklat, bahan pembelajaran, uji kompetensi dan sertifikasi, kompetensi guru dan manajemen diklat (Supriadi, 2002:588).

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan SMK terutama menyiapkan peserta didik memasuki lapangan pekerjaan dan telah mengamanatkan

antara lain bahwa pendidikan di SMK dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kompetensi serta pada akhir pendidikan peserta didik yang memenuhi persyaratan akan memperoleh ijazah dan sertifikat kompetensi (Depdiknas, 2004). Selanjutnya untuk dapat diterima bekerja di dunia kerja/ industri (Du/Di) seseorang harus kompeten, secara legal formal antara lain dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat kompetensi sebagai "paspor ketrampilan" yang memuat ketrampilan-ketrampilan berbasis kompetensi yang dimiliki oleh pemegangnya melalui uji kompetensi. Sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap seseorang yang dinyatakan kompeten untuk melakukan pekerjaan tertentu melalui proses uji kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi dan atau lembaga sertifikasi, yang secara jelas terungkap dalam pasal 61 ayat 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003.

Persyaratan esensial yang harus dipenuhi dalam sertifikasi kompetensi yaitu obyektif dan akuntabel, maka sertifikasi kompetensi dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Berdasarkan pada persyaratan tersebut, maka dalam kerangka Badan Nasional Sertifikasi Profesi terdapat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai pelaksana dari badan nasional tersebut. LSP dibentuk berdasar pada sektor atau profesi yang merupakan lembaga independen berbadan hukum untuk tujuan non profit. LSP dapat terdiri dari unsur asosiasi industri, profesi, pakar dan unsure lemdiklat yang relevan dengan sektor atau profesi yang akan ditanganinya. LSP akan memperoleh lisensi dari BNSP setelah melalui proses akreditasi.

Namun demikian uji kompetensi keahlian siswa SMK yang telah dilaksanakan perlu ditelisik secara cermat apakah konsep pelaksanaan uji kompetensi telah menganut kaidah-kaidah pengujian

berbasis kompetensi (*Competency-based Assessment*), mengingat di SMK telah diimplementasikan pembelajaran berbasis kompetensi (*Competency-based Learning*).

IMPLEMENTASI WORK BASED LEARNING DI SMK

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan kejuruan harus bisa menciptakan peserta didik yang kompeten pada bidang tertentu sehingga setelah selesai (lulus) diproyeksikan kedalam tiga tujuan: (1) mampu bekerja untuk dapat menghidupi dirinya sendiri; (2) menjadi wirausahawan yang mampu bekerja untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dan merekrut orang lain untuk diajak berkerja; dan (3) melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana digariskan oleh kebijakan pembangunan pendidikan SMK (Depdiknas, 2009: 20).

Berdasarkan tujuan pendidikan SMK di atas yaitu lulusnya dapat bekerja pada sektor-sektor formal dan mampu berwiraswasta, maka ada dua komponen pendidikan kejuruan yang tidak dapat dipisahkan yaitu sekolah dan industri. Dengan demikian antara sekolah dan industri pada pendidikan kejuruan kedua tidak bisa saling meniadakan.

Kegiatan belajar di SMK yang mendidik dan memberikan latihan keterampilan dan praktik secara berkelompok maupun perorangan memberikan kemampuan kognitif dan psikomotor pada bidang yang dipelajari. Bimbingan instruktur atau guru dalam hal ini sangat diperlukan untuk membantu pemahaman dan kemampuan kejuruannya sehingga kemampuan tersebut nantinya mempunyai kontribusi terhadap kehidupan sosialnya. Menurut Billett (2003: 242), bimbingan sangat diperlukan untuk mendapatkan kemampuan praktik kejuruan untuk memperluas kemampuan praktik

lainnya yang masih berkaitan dengan hal yang dipelajari. Sesuai dengan pendapat itu, memang dalam pendidikan kejuruan pembimbingan dalam meraih kemampuan praktis selalu digunakan sehingga semua prosedur standar untuk melakukan latihan kerja akan terjaga dan dilakukan secara benar.

Menurut Winch (2000:93) pelatihan atau *training* merupakan suatu kunci pendidikan. CBET (*Competence Based Education and Training*) atau pendidikan dan latihan berbasis kompetensi adalah model yang paling sesuai untuk menghasilkan tenaga terlatih tingkat rendah / menengah. Menurut Cristian (2006), siswa yang bersekolah di sekolah kejuruan 3 tahun mempunyai beberapa keuntungan yaitu mudah dalam memasuki dunia kerja, dapat mengikuti pelatihan satu tahun lanjutan, atau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Model pendidikan kejuruan yang digunakan adalah pelatihan berbasis kompetensi yang secara khusus dikembangkan untuk menghasilkan *outcome* kompetensi tertentu, tuntunan penilaian dan kualifikasi nasional, sesuai dengan kebutuhan keahlian di tempat kerja (Pavlova, 2009:7).

Kebijakan *link and match* yang pernah digulirkan di era 1998an memberikan warna cerah terhadap prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam WBL. Sebagaimana dijelaskan oleh Djojonegoro (1998: 78), tujuan program tersebut adalah: pertama, bahwa sekolah kejuruan adalah program bersama (*joint program*) antara pendidikan kejuruan dengan industri/perusahaan pasangan. Prinsip ini konkretisasi peralihan dari *supply driven* ke *demand driven*; kedua program pendidikan kejuruan dilaksanakan di dua tempat yaitu di sekolah dan industri.

Keterlibatan pihak DU/DI sangat diperlukan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengujian kompetensi,

mengingat bahwa sekolah sebagai pemasok sumber daya yang diperlukan DU/DI harus memenuhi kebutuhan kompetensi yang diperlukan. Dengan demikian dihindari adanya lulusan yang *mismatch* dan *underqualified*.

Dengan adanya keterkaitan antara pendidikan kejuruan dan dunia kerja maka implementasi program WBL harus diterapkan karena:

- 1). *The sine-qua-on* dari organisasi pembelajaran membutuhkan yang terus menerus.
- 2). Laju pembelajaran harus seiring dengan laju perkembangan.
- 3). Untuk membuat belajar adalah jalan kehidupan, belajar menjadi alamiah, menyenangkan; perbedaan antara teori dan praktik menjadikan pembelajaran serasa tidak relevan, tidak praktis dan membosankan.
- 4). WBL menyediakan kombinasi analisis rasional, imajinasi dan intuisi.

Secara khusus kearah satu tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Oleh karena lulusan SMK dipersiapkan untuk memasuki lapangan kerja, maka secara ekonomis, semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang, maka akan semakin produktif, sehingga selain akan meningkatkan produktivitas nasional juga akan meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global.

Work Based Learning (WBL) atau Pembelajaran Berbasis Kerja telah menjadi ciri khas pendidikan kejuruan pada berbagai negara di berbagai belahan bumi ini. Model pembelajaran berbasis kerja yang telah membumi dalam dunia kejuruan (model ini belum terbantahkan) saat ini menjadikan WBL suatu keharusan untuk diimplementasi jika kesuksesan ingin diraih. Pengalaman di beberapa negara maju menunjukkan bahwa metoda ini mampu menjembatani gap/kesenjangan transisi (*transition*) antara dunia pendidikan

(*education*) dan dunia kerja (*workforce*) yang menjadi tantangan besar yang harus disikapi dan dicarikan pemecahannya (Sawchuk, 2010). Adopsi dan adaptasi sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan kultur bangsa. Inilah pentingnya pemahaman dan komitmen bersama dalam membangun serta mengembangkan pendidikan kejuruan melalui penerapan/ implementasi WBL pada pendidikan kejuruan.

Menurut Reg Revans dan Gregory Bateson dalam bukunya Raelin (2008:1) menjelaskan bahwa laju belajar harus sama dengan atau melebihi tingkat perubahan, belajar tidak hanya menciptakan tapi juga menyesuaikan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan. Tanpa pengetahuan baru atau yang disesuaikan, tidak mungkin untuk mengubah makna tindakan kita atau tindakan itu sendiri. Sayangnya, kita telah menjadi terkondisi untuk model kelas yang memisahkan teori dari praktek, yang membuat belajar tampaknya tidak praktis, relevan, dan membosankan.

Ditegaskan pula bahwa *Work Based Learning* (WBL) adalah pelajaran atau program dimanana kampus/sekolah dengan organisasi pekerjaan bersama-sama menciptakan pengalaman pembelajaran dan peluang baru di tempat pekerjaan (Boud, 2001: 6). Untuk menjadikan belajar sebagai jalan hidup maka pembelajaran harus berlangsung secara alamiah dan menyenangkan. Pemisahan teori dari paraktik membuat pembelajaran terasa tidak relevan, tidak berguna dan membosankan. WBL mempersyaratkan sebuah kombinasi dari analisis rasional, imajinasi dan intuisi yang bermanfaat dalam mengembangkan pemikiran. Sedangkan program WBL di sekolah dapat berupa Unit Produksi, Program Implementasi Karir, Program Penegenalan Karir, Perusahaan sekolah (hotel, rumah makan), Koperasi Sekolah

dan Bank di sekolah serta program magang (PSG/PKL).

Untuk mendukung ketercapaian program tersebut pembelajarannya dapat dilakukan dengan pendekatan akademik, pendekatan kecakapan hidup (*life skill*), pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*), pendekatan kurikulum berbasis luas (*broad-based curriculum*), pendekatan kurikulum berbasis produksi (*production-based curriculum*). Sedangkan pola penyelenggaraannya dilakukan dengan prinsip pendidikan sistem ganda (PSG), yaitu pendidikan yang dilakukan secara bekerja sama antara sekolah dan dunia usaha dan industri (DU/DI), baik melalui perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum, yang bertujuan untuk mendekatkan kebutuhan dunia usaha dan industri. Disisi lain untuk mengantisipasi dan sekaligus mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di dunia kerja pelaksanaan kurikulum SMK harus dirancang secara dinamis dan fleksibel.

Kurikulum Berbasis Kerja (*Work Based Curriculum*) yang direncanakan sefihak (belum melibatkan dunia kerja), keengganan fihak industri dalam menerima siswa/mahasiswa praktik, kurang seriusnya pembimbing industri dalam menangani siswa/mahasiswa praktik, kurangnya kontrol sekolah terhadap pelaksanaan magang (PSG atau PKL atau Praktik Industri) yang dikarenakan kurangnya dana, sering berubahnya kebijakan pemerintah dan masih banyak lagi; menjadi tantangan dan memuntut keseriusan semua fihak untuk memikirkan jalan keluarnya. Menurut Nurhadi, dkk. (2004) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum menjadi prasarat yang harus

dirumuskan terlebih dahulu (*prerequisite*) supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan demikian dalam penyusunan kurikulum berbasis kerja (*work based curriculum*) harus mengintegrasikan antara belajar di kelas dengan pengalaman di dunia kerja.

Pendekatan pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum di SMK antara lain dengan pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*), pembelajaran kooperatif (*Cooperatif Learning*), pembelajaran berbasis inquiry (*Inquiry Based Learning*), pembelajaran autentik (*Authentic Instruction*), pembelajaran berbasis proyek/tugas (*Project Based Learning*), pembelajaran Berbasis Kerja (*Work Based Learning*), dan pembelajaran berbasis jasa layanan (*Service Learning*) (Nurhadi dkk, 2004).

Dari metoda-metoda pembelajaran di atas menempatkan pembelajaran berbasis kerja (*Worked Based Learning*) pada posisi sangat penting dalam mengimplementasikan kurikulum SMK, dimana WBL merupakan pembelajaran dengan pendekatan yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran dan menggunakan materi tersebut di tempat kerja. Jadi tempat kerja atau sejenisnya dipadukan dengan materi pelajaran untuk mendapatkan pengalaman baru bagi siswa.

Kurikulum berbasis kompetensi (*Competency-based Curriculum*) di SMK, baik dalam perancangan dan penyusunan maupun dalam pelaksanaannya juga harus menggunakan pendekatan berbasis kompetensi, termasuk dalam sistem penilaian yang digunakan. Uji kompetensi keahlian yang merupakan sistem penilaian hasil belajar yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk menilai apakah siswa tersebut memiliki kompetensi tertentu. Sehingga perlu ditegaskan bahwa konsekuensi dari penerapan pembelajaran

berbasis kompetensi (*Competency-based Learning/CBL*) adalah bahwa penilaian hasil belajarnya juga harus berbasis kompetensi (*Competency-based Assessment /CBA*).

METODE UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Assessment menurut Finch (1999: 271) didefinisikan sebagai *as the determination of the merit or worth of a curriculum (or portion of that curriculum). It includes gathering information for use in judging the merit of the curriculum, program, or curriculum materials*. Sedangkan menurut *Australia's National Training Framework (NTF)*, *competency-based assessment* didefinisikan ; *whether a person has the skills, knowledge and experience required to perform specific tasks in the workplace, or to gain credit towards a vocational education and training qualification or course. Assessment is based on industry determined competency standards*. Sedangkan asesmen/pengujian menurut Depdiknas (2004:3) adalah suatu proses pengumpulan bukti dari seseorang, sebagai bahan untuk membuat penilaian apakah yang bersangkutan kompeten atau belum kompeten sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tuntutan pekerjaan/tugas atau jabatan sesuai dengan tuntutan standar yang ditetapkan.

Penilaian hasil belajar dalam sistem pembelajaran kompetensi pada dasarnya merupakan proses penentuan untuk memastikan peserta didik apakah sudah kompeten atau belum kompeten. Penentuan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan bukti-bukti hasil belajar (*learning evidence*) yang diperoleh seorang peserta didik dengan kriteria kinerja (*performance criteria*) yang ditetapkan pada standar kompetensi. Untuk mengumpulkan

bukti-bukti tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, sesuai dengan karakteristik keahlian dan konteks pengujian. Lebih lanjut Depdiknas (2004:1) merumuskan tujuan penilaian (*assessment*) hasil belajar berbasis kompetensi (*competency-based assessment*) antara lain: (a) menyediakan acuan atau referensi penilaian hasil belajar peserta didik yang sesuai dengan kurikulum SMK berbasis kompetensi (*Competency-based curriculum*), (b) meningkatkan mutu pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik baik yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah dan di industri, maupun yang berkaitan dengan penilaian penguasaan kompetensi, (c) mengembangkan model penilaian berbasis kompetensi (*competency-based assessment*) yang dalam pelaksanaannya melibatkan unsur internal dan eksternal yang relevan.

Adapun kriteria penilaian meliputi (Depdiknas: 2007): (a) validitas, (b) reliabilitas, (c) terfokus pada kompetensi, (d) komprehensif, (e) obyektif, dan (d) mendidik. Sedangkan teknik penilaian dapat dilakukan dengan cara: (a) penilaian unjuk kerja, (b) penilaian sikap, (c) penilaian tertulis, (d) penilaian proyek, (e) penilaian produk, (f) penggunaan portofolio, dan (g) penilaian diri. Serta terdapat 10 faktor (Cumming, 2004) yang mempengaruhi keberhasilan penilaian di pendidikan kejuruan meliputi: (1) *a strong curriculum base influencing assessment*, (2) *the incorporation of school-based assessment in all certification*, (3) *preference for standards-referenced assessment*, (4) *respect for teacher judgement*, (5) *increasing vocational education delivery within schooling*, (6) *multiple pathways to future study and careers*, (7) *school-based assessment in the compulsory years of schooling*, (8) *moves towards outcomes-based frameworks*, (9) *issues relating to national benchmark data*, and (10) *equity issues*.

Dalam rangka mengumpulkan bukti untuk membuat penilaian, dipakai beberapa metode pengujian yang selama ini sudah banyak dipakai sebagai metode evaluasi untuk mengukur keberhasilan proses pendidikan dan pelatihan. Metode penilaian kompetensi dapat dilakukan dengan cara (Gonczi: 1998): (a) *norm-referenced standards*, (b) *task-referenced standards*, (c) *criterion-referenced standards*. Masih menurut Gonczi (1998) metode penilaian berbasis kompetensi antara lain: (1) *pencil and paper test*, (2) *multiple choice test*, (3) *written response test*, (4) *oral assessment*, (5) *performance assessment*, (6) *work-based assessment*. Senada dengan hal tersebut Depdiknas (2004:3) mengajukan beberapa model, yaitu: (1) test tertulis, (2) wawancara, (3) observasi, (4) portfolio, (5) penugasan/pemberian proyek dan (6) menggunakan pihak ketiga. Pada pelaksanaan asesmen untuk menetapkan seseorang kompeten atau belum, perlu dipakai lebih dari satu metode pengujian yang dipakai untuk pengumpulan bukti. Penggunaan lebih dari satu metode dimaksudkan agar asesmen yang dilakukan dapat mengungkap aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap secara komprehensif dan proposional. Alasan lain penggunaan lebih dari satu metode pengujian adalah, bahwa masing-masing metode memiliki karakteristik dan kekuatan serta kelemahan dalam mengungkap aspek yang terkandung dalam kompetensi. Sebagai contoh metode tes tertulis akan efektif untuk mengungkap aspek penguasaan pengetahuan dan memiliki kelemahan dalam menggali aspek keterampilan. Sebaliknya metode wawancara akan efektif untuk menggali sikap dari peserta uji akan tetapi kurang tepat untuk mengungkap kemampuan psikomotoriknya.

MODEL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA SMK

Pelaksanaan uji kompetensi keahlian

siswa SMK yang berlangsung sekarang ini setidaknya ada tiga model dari lima model yang dijelaskan oleh Depdiknas (2004:5) dalam direktori Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan TUK . *Pertama*, konsep pengujian dan sertifikasi kompetensi keahlian pada ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2006/2007 untuk jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan rumusan kebijakan baru. Pembaharuan yang dilakukan dalam kerangka ini adalah dimasukkannya nilai komponen produktif dalam nilai akhir UN (selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 45 Tahun 2006 disebut kompetensi keahlian). Uji Kompetensi keahlian di SMK yang merupakan bagian dari UN menggunakan pendekatan *project work*. Pada model *project work* pelaksanaannya diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional, mulai dari jadwal, materi, asesor, tempat uji serta biaya penyelenggaraan.

Kedua, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi berikutnya adalah dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), untuk Teknik Permesinan oleh LSP-LMI (Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia). Karena uji kompetensi dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga pencari kerja maka sertifikat yang diperoleh oleh siswa tidak diragukan lagi oleh dunia usaha/industri dan kompetensi yang diujikan sesuai apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Permasalahannya yang muncul adalah tidak semua wilayah dimana terdapat program keahlian (misalnya program keahlian teknik permesinan) terdapat pula LSP yang sesuai dengan Program Keahlian di SMK maka banyak ditemukan kesulitan dalam pelaksanaannya, seandainya harus dilakukan akan memerlukan biaya yang tinggi (tidak dapat dijangkau oleh semua siswa). Biaya yang mahal akan menjadikan penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi model ini tidak dapat diakses

oleh semua siswa SMK.

Selanjutnya *ketiga*, terdapat model uji kompetensi dan Sertifikasi dilakukan oleh sekolah (SMK Mikael Surakarta). Kekuatan *learning factory* menjadikan sekolah mampu menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Uji kompetensi dilakukan oleh sekolah sendiri namun sertifikatnya memedapatkan pengakuan oleh dunia usaha/industri. Pola ini sebenarnya dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lain tetapi tidak semua sekolah memiliki asesor dan TUK seperti yang dimiliki oleh STM Mikael Surakarta. Selain itu STM Mikel Surakarta juga melakukan uji kompetensi dan sertifikasi keahlian teknik permesinan ke beberapa sekolah lain yang ada di Jawa Tengah.

Dari ketiga model tersebut maka model *project work* adalah model yang paling banyak diterapkan oleh SMK sebagai model uji kompetensi, sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Samsudi dkk (2009) bahwa sebanyak 74.28% responden menegaskan bahwa sebaiknya pelaksanaan uji kompetensi siswa dalam rangka ujian nasional tetap menggunakan pendekatan *project work* dengan verifikasi internal dan eksternal; namun pada saat yang sama 36.52% responden juga memberikan alternatif untuk menggunakan pendekatan/ model yang diterapkan oleh LSP-BNSP.

PENUTUP

Uji kompetensi keahlian siswa SMK sebagai penilaian hasil belajar dalam sistem pembelajaran kompetensi pada dasarnya merupakan proses penentuan

untuk memastikan peserta didik apakah sudah kompeten atau belum kompeten. Dengan implementasi *Competency-based Learning* di SMK berdampak terhadap sistem penilaian yang digunakan. Sehingga perlu ditegaskan bahwa konsekuensi dari penerapan pembelajaran berbasis kompetensi adalah bahwa penilaian hasil belajarnya juga harus berbasis kompetensi (*Competency-based Assessment /CBA*). Terdapat tiga model uji kompetensi keahlian siswa SMK, yaitu (a) model *project work* pelaksanaannya diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional, mulai dari jadwal, materi, asesor, tempat uji serta biaya penyelenggaraan, (b) uji kompetensi dan sertifikasi berikutnya adalah dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan (c) model uji kompetensi dan Sertifikasi dilakukan oleh sekolah (SMK Mikael Surakarta). Diharapkan uji kompetensi keahlian siswa yang dilaksanakan di SMK dapat dilaksanakan sesuai dengan metode yang tepat sesuai dengan kaidah pengujian/penilaian berbasis kompetensi (*Competency-based Assessment*).

DAFTAR PUSTAKA

- Billett, S. 2003. *Developing Vocational Expertise: Guiding vocational Learning*, Allen & Unwin, Crows Nest Australia.
- Boud David and Solomon Nicky. 2003. *Work Based Learning: A New Higher Education*. USA
- Cristian, M, 2006, *General Education versus Vocational Training: Evidence from an Economy in Transition*. University of Chicago- Columbia Universi